



BUPATI GIANYAR
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2016

PROVINSI BALI

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (*ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
5. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan , program dan kegiatan pembangunan daerah.

6. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan.
8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya pedoman Pelaksanaan RADPUG adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan lembaga Kernasyarakat lainnnya.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Pedoman Pelaksanaan RADPUG adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas Kebijakan Pembangunan Daerah bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan lembaga kemasyarakat lainnya yang berperspektif gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

BAB III SISTEMATIKA RAD PUG

Pasal 4

- (1) Sistematis RAD PUG terdiri dari :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : ANALISA SITUASI
 - BAB III : ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV : RENCANA AKSI DAERAH PUG
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 4 Januari 2016
BUPATI GIANYAR,

Ttd.

A.A.GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN	PERATURAN	BUPATI	GIANYAR			
NOMOR	2	TAHUN	2016			
TANGGAL	4	JANUARI	2016			
TENTANG	PEDOMAN	PELAKSANAAN	RENCANA	AKSI	DAERAH	
	PENGARUSUTAMAAN	GENDER	KABUPATEN	GIANYAR		

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang :

Secara geografis wilayah Pernerintahan Daerah terletak antara 080 18'48" - 080 38'58" lintang Selatan dan 111 50' 13'29" - 111 50' 22'23" Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar disebelah barat, Kabupaten Bangli disebelah Utara, dan Klungkung disebelah Timur serta selat Badung dan Samudra , Indonesia disebelah Selatan.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Bali, dengan luas wilayah 36.800 hektar atau 6,53% dari luas pulau Bali secara keseluruhan dan terbagi menjadi 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gianyar, Blahbatuh, Sukawati, Ubud, Payangan, Tegallalang dan Kecamatan Tampaksiring.

Penduduk Kabupaten Gianyar, selama dua tahun terakhir menunjukan jumlah yang terus bertambah pada tahun 2014 jumlah penduduk sebesar 526.953 ribu jiwa yang terdiri dari 262.993 laki - laki dan 263.960 perempuan dan tahun 2015 bertambah menjadi sebesar 535.867 ribu jiwa, yang terdiri dari 267.740 ribu laki - laki dan 268.127 ribu jiwa perempuan.

Pembangunan Daerah yang telah dicapai selama ini salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi komponen pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan keluarga. Indikasi keberhasilan adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar yang terus mengalami peningkatan dari 74,00 pada tahun 2013 menjadi 74,29 pada tahun 2014

Berbagai upaya pembangunan yang selama ini diarahkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ternyata belum dapat memberikan akses, kontrol dan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan bahkan belum cukup efektif dalam memperkecil kesenjangan yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan untuk memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi, karena belum termanfaatkannya kepastian sumber daya manusia secara penuh. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku pembangunan.

Kesenjangan gender masih ditemukan di berbagai bidang pembangunan, hal ini disebabkan karena kondisi dan posisinya yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya ketrampilan, kesehatan, sehingga peran, fungsi dan kontrol alam mengakses sumber daya pembangunan sangat terbatas.

Di Kabupaten Gianyar Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan lebih tinggi dari pada laki - laki yaitu sebesar 45.72 % persen dibanding dengan laki-laki 31,38 persen pada tahun 2013.

Dibidang politik, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legeslatif. namun hasil PEMILU tahun 2009 dan tahun 2014 masih menunjukan rendahnya keterwakilan perempuan, di DPRD Kabupaten Gianyar hanya 3 orang dan rendahnya keterlibatan perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon II

Kenyataan tersebut pada gilirannya telah mendorong pihak Pemerintah Daerah berupaya untuk meluncurkan program pembangunan yang mensyaratkan partisipasi seluruh komponen masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan, baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Langkah strategi ditempuh dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dengan dasar itu Pemerintah Kabupaten Gianyar menjadikan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan yang merata, setara dan berkeadilan.

Pemahaman strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan perlu diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Gianyar. Untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG), maka diperlukan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) secara terinci dapat dipetakan skala pertama, inisiasi dan legalisasi prasyarat Pengarusutamaan Gender , merupakan tahap inisiasi yang diwujudkan dengan penguatan penggalangan dan kerjasama. Penguatan managerial pementapan aturan dan pembelajaran bagi pimpinan dan focal point di setiap SKPD. Tahap kedua, pelaksanaan (Exesuting) dan pementapan

(2014 - 2018), merupakan pembangunan Kelembagaan dan Pemberdayaan Gender secara teknis dan teratur. Tahap ketiga, pengembangan (Development) merupakan tahap pembangunan yang sistematis yang dilakukan secara terus menerus dari mulai tahap pertama dan kedua, tahap ketiga ini merupakan kegiatan yang secara horizontal dan vertikal, merupakan koreksi dan penyempurnaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara efektif, perwujudan sistem dan tatanan sosial kemasyarakatan serta perwujudan pembangunan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai pemetik manfaat dari setiap pembangunan yang dilaksanakan serta menampilkan kinerja yang terukur, terakuntabilitas dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati setiap tahunnya.

Dari seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat mewujudkan keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dan memperhatikan aspirasi masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Sehingga strategi pembangunan yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan.

Adapun lahirnya dokumentasi RAD PUG Kabupaten Gianyar dimotivasi oleh :

1. Masukan dan Rekomendasi dari para pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai hasil dari kajian efektifitas strategi Pengarusutamaan Gender;
2. Masukan dari stakeholders (pemangku kepentingan) untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender. Diharapkan dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
3. Sebagai strategi dan memudahkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan;
4. Masukan /pemikiran para anggota legislatif dan mitra terkait dalam perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG); dan
5. Mempercepat tujuan dan program prioritas pembangunan Daerah.

b. Tujuan RAD PUG

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)

bertujuan untuk :

1. Mengkaji efektivitas pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender secara lebih kongkrit dan terarah untuk menjamin agar laki-laki dan perempuan memperoleh akses, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat dalam pembangunan yang berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender;
2. Membuat, panduan dalam menyusun kebijakan dan program dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembangunan;
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pembangunan.
4. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan berprinsip pada nilai-nilai anti kekerasan dan semua aspek kehidupan;
5. Mengupayakan perubahan kebijakan dan implementasinya agar sensitif dan responsif terhadap persoalan gender terutama persoalan kekerasan terhadap perempuan.

c. Ruang Lingkup :

I. Substansi

- a. RAD PUG merupakan pedoman bagi SKPD, dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan yang responsif gender.
- b. Fokus pada perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi; dan
- c. Pelaksanaan Program, kegiatan dan akuntabilitas kinerja dalam PUG

2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Adanya semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif), dan masyarakat lainnya.

- a. Semua SKPD yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- b. Instansi Vertikal
- c. Perguruan Tinggi dan
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat

d. Landasan Hukurn

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Aset Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PM K.02/2015 Tahun 2015 tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar

BAB II

ANALISA SITUASI

A. Profil Gender di Kabupaten Gianyar

1. Penduduk :

Tabel 1

Jumlah Penduduk , Luas Wilayah, Sex Ratio, dan Kepadatan Per-Kecamatan Keadaan Terakhir Tahun 2015

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk			Sek Ratio	Kepadatan per Km2
		Laki	Perempuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
1. Sukawati	55,02	55.367	54.990	110.357	100,68	1.063,23
2. Blahbatuh	39,70	40.132	40.129	80.261	100,01	866,33
3. Gianyar	50,59	54.082	53.479	107.561	101,13	887,18
4. Tampaksiring	42,63	28.473	27.784	56.257	102,37	548,90
5. Ubud	42,38	37.424	37.378	74.802	100,12	844,86
6. Tegallalang	61,80	26.595	26.966	53.561	98,62	417,80
7. Payangan	75,88	24.803	25.051	49.854	99,01	279,13
Kab. Th. 2015	368,00	266.878	265.777	532.653	100,41	662,99
Kab. Th. 2014	368,00	263.960	263.043	527.003	100,35	662,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Gianyar

Secara nasional, pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 350 juta . Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 sebanyak 527.003 terdiri dari 263.960 laki - laki dan 263.043 perempuan, dan meningkat menjadi 532.653 di tahun 2015, yang terdiri dari laki - laki 266.878 dan perempuan 265.777 jiwa

Tabel II
Penduduk Kabupaten Gianyar menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin,
Tahun 2015

Umur	Jenis kelamin		Total
	Laki- Laki	Perempuan	
15 - 19	22.225	20.632	42.857
20-24	19.589	19.165	38.754
25 - 29	16.177	17.097	33.274
30 -34	18.518	19.485	38.003
35 - 39	21.030	22.326	43.356
40- 44	24.762	24.498	49.260
45 -49	21.361	17.36	42.097
50 -54	16.169	16.182	32.351
55 - 59	13.279	14.282	27.561
60 - 64	10.756	10.654	21.410
65 - 69	8.742	9.709	18.451
70 +	18.582	20.404	38.986
Total	267.740	268.127	535.867

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Gianyar

Usia produktif seseorang adalah periode saat usia 15 sampai dengan 60 tahun. Jumlah penduduk perempuan usia produktif hampir sama dengan jumlah penduduk laki- laki usia produktif,

Jumlah penduduk laki - laki dan perempuan yang cenderung bertambah setiap tahun dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban apabila kualitasnya rendah. Ketersediaan data penduduk dengan berbagai ciri latar belakangnya seperti jenis kelamin, ciri - ciri sosial budaya dan penyebaran penduduk sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Karena tujuan pembangunan bukan bertumpu pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata namun upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tabel III
Jumlah Kepala Rumah Tangga
Menurut Jenis Kelamin di
Kabupaten Gianyar Tahun 2014, 2015

KECAMATAN	LAKI	2014		2015		
		PR	KK	LAKI	PR	KK
GIANYAR	21.985	1.150	23.135	22.231	1.215	23.446
BLAHBATUH	16.018	904	16.922	16.165	941	17.106
SUKAWATI	22.502	1.028	23.530	22.833	1084	23.917
UBUD	15.195	662	15.857	15.392	714	16.106
PAYANGAN	10.256	549	10.805	10.370	563	10.933
TAMPAKSIRING	11.964	570	12.534	12.111	593	12.706
TEGALLALANG	10.621	476	11.097	10.717	500	11.217
JUMLAH	108.541	5.339	113.880	109.819	5.610	115.429

Secara nasional terdapat sekitar 12,6 % dari rumah tangga di Indonesia Kepala rumah tangganya adalah perempuan. Di Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 terdapat 4,69 persen perempuan sebagai kepala tangga dan pada tahun 2015 terdapat 4,86 persen kepala rumah tangga adalah perempuan, banyak faktor penyebab, mengapa perempuan menjadi kepala rumah tangga. antara lain suami meninggal, bekerja di luar daerah dalam waktu yang relatif lama atau suami sakit.

2. Pendidikan :

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tujuan pendidikan sesuai Undang - Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan memiliki tujuan yang amat mulia karena berfungsi penting bagi pembentukan watak dan peradaban bangsa, oleh karena itu pendidikan bagi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin menjadi hal yang mutlak dan penting,

Pada saat ini, secara umum telah terlihat adanya transisi pendidikan, baik di Provinsi Bali maupun di Kabupaten Gianyar. Transisi pendidikan tidak hanya meliputi proses perubahan dari masyarakat yang tidak terdidik menjadi masyarakat yang terdidik, tetapi juga meliputi perubahan ke arah bentuk pendidikan yang mempunyai kualitas yang lebih baik (Nachrowi, 1995; Marhaeni, 2005:38). Transisi tersebut meliputi tiga hal, yaitu (1) adanya kesempatan belajar yang semakin luas dan merata; (2) makin lamanya seseorang menghabiskan waktunya di bangku sekolah; dan (3) semakin meningkatnya kemampuan masyarakat membiayai pendidikan dan masyarakat membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Dalam kaitan tersebut, upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan terlihat nyata terutama sejak tahun tujuh puluhan. Hal itu terlihat dari peningkatan sarana pendidikan, khususnya pembangunan SD inpres dan program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Selain itu, dikenal pula adanya program Kejar Paket A, program BOS (bantuan operasional sekolah), dan lain-lain yang tujuan akhirnya adalah agar semua penduduk usia sekolah, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengikuti pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar.

Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang pendidikan dengan tegas menyebutkan bahwa " setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu ", dibawah ini beberapa profil pendidikan sebagai sarana strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan program Pemerintah pada bidang pendidikan

Tabel IV
Angka Melek Huruf Penduduk
di Kabupaten Gianyar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014, 2015

Tahun 2014				Tahun 2015		
Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P		L	P	
15 +	95,83	85,03	90,44	95,18	87,97	91,61
15 - 24	100	100	100	100	100	100
25 - 64	97,01	88,71	92,9	97,10	89,92	93,55
65 +	55,96	31,68	43,98	58,82	26,66	41,18

Pada tahun 2013, pendidikan penduduk relatif membaik. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Gianyar usia 25 - 64 tahun, tahun 2013 sebesar 92,9 persen naik menjadi 93,55 persen pada tahun 2014.

Dilihat dari akses pelayanan pendidikan atau partisipasi pendidikan anak, khususnya usia pendidikan dasar (7-15 tahun) setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Adanya peningkatan dalam pembangunan pendidikan perspektif pemerataan pendidikan, dimana angka partisipasi Kasar (APK) anak usia 7 - 12 tahun (usia SD) dari. 94,05 % pada tahun 2014 menjadi 93,34 % di Tahun 2015. APK anak usia sekolah 13 - 15 tahun (usia SLTP) juga menunjukkan peningkatan dari 90,96% di tahun 2014 menjadi 90,96% di tahun 2015. Demikian pula untuk anak usia 16 - 18 tahun (usia sekolah SLTA) dari 78,39 % pada Tahun 2014 menjadi 86,50% pada Tahun 2015, seperti terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel V
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut
Jenis Kelamin di Kabupaten Gianyar Tahun 2014, 2015

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN 2014		TOTAL	TAHUN 2015		TOTAL
		L	P		L	P	
1	TK	35,88	36,22	36,05	38,99	39,19	39,09
2	SD	94,26	91,83	94,05	94,39	92,29	93,34
3	SMP	90,40	51,51	90,96	90,73	91,19	90,96
4	SMA	79,95	76,82	78,39	86,87	86,14	86,50

Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan salah satu indicator yang digunakan untuk melihat sukses tidaknya upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. APM merupakan sebagai suatu perbandingan antara jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. Rata - rata APM Tingkat SD (usia 7 - 12 tahun) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 APM Tingkat SD sebesar 83,89 dimana laki - lakinya 84,36 dan perempuan 83,42 sedangkan APM Tingkat SD pada tahun 2015 sebesar 83,73. yang terdiri dari laki - laki sebesar 84,84 dan perempuan sebesar 82,62.

Rata - rata APM Tingkat SLTP (usia 13 - 15 tahun) dan APM Tingkat SLTA (usia 16 - 18 tahun) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Pada tahun 2014 APM Tingkat SLTP sebesar 67,80 (laki - laki 67,53 dan perempuan 68,07) meningkat di tahun 2015 sebesar 70,82 (laki - laki 71,95 dan perempuan 69,69) sedangkan rata APM Tingkat SLTA pada tahun 2014 sebesar 54,64 (laki - laki 61,88 dan perempuan 57,40) mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 63,14 (laki - laki 64,57 dan perempuan 61,71) seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel VI
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut
Jenis Kelamin di Kabupaten Gianyar Tahun 2014, 2015

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN 2014			TAHUN 2015		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	SD	84,36	83,42	83,89	84,84	82,62	83,73
2	SMP	67,53	68,07	67,80	71,95	69,69	70,82
3	SMA	61,88	57,40	54,64	64,57	61,71	63,14

3. Kesehatan :

Kesehatan adalah salah satu unsur dasar penting sebagai pembentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, oleh karena itu kesehatan mendapat perhatian serius tidak saja oleh individu atau masyarakat tetapi juga oleh Pemerintah. Menurut WHO yang juga tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan, dinyatakan yang dimaksud dengan kesehatan adalah : keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis.

Di Kabupaten Gianyar dari angka harapan hidup (sumber data dari BPS Kabupaten Gianyar) menunjukan peningkatan, setiap tahunnya, pada tahun 2012 sebesar 72,57 %, Tahun 2013 sebesar 72,71 % dan pada tahun 2014 menjadi 72,78 %

Tabel VII

AKB, Cakupan Pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki Kompetensi Dasar dari tahun 2012 - 2015

TAHUN	AKB per / 1000 Kelahiran Hidup	Cakupan Pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki Kompetensi Dasar
2013	12,34/ 1 000 KH	93,36%
2014	10, 1/1000 KH	98,34 %
2015	10,03/1000 KH	94,83 %

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi baru lahir per 1000 kelahiran hidup menunjukkan adanya penurunan, pada tahun 2013 sebanyak 12,34/1000KH dan mengalami penurunan di Tahun 2014 sebesar 10,1/1000KH dan sebesar 10,03/1000KH, hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel VIII

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AIR BERSIH TAHUN 2013, 2014 DAN TAHUN 2015

TAHUN	% RT YG MEMILIKI AIR BERSIH	KETERANGAN
2013	92,30 %	
2014	87,06 %	
2015	82, 12	

Lingkungan fisik dan kesehatan lingkungan dapat dijadikan indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat disamping indikasi tingkat kesejahtraannya. Yang penting untuk menjadi perhatian adalah akses terhadap air bersih dan sehat, dan akses terhadap sanitasi.

Ketersediaan air bersih adalah kebutuhan pokok manusia sebagai konsumsi air minum, memasak, mandi dan mencuci. Pada tahun 2013 daerah pedesaan yang memiliki air bersih sekitar 92,30 % rumah tangga dapat akses air bersih, mengalami penurunan menjadi 87,06 % rumah tangga pada tahun 2014, begitu pula pada tahun 2015 sebesar 82,12 % hal ini perlu mendapat perhatian untuk kegiatan di tahun mendatang bagi pemegang program di Kabupaten Gianyar. Kemudahan memperoleh air bersih akan mengurangi beban kerja bagi kaum perempuan dalam urusan rumah tangga.

Tabel IX
Persentase Penduduk yang memiliki Akses Sanitasi Layak
dari tahun 2013 - 2015

TAHUN	PERSENTASE	KETERANGAN
2013	44,8 %	
2014	83,70 %	
2015	91,27	

Rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi terus semakin membaik. Pada tahun 2013 sekitar 44,8% persen Rumah Tangga yang memiliki Mandi Cuci Kakus (MCK), meningkat 83,70 persen pada tahun 2014, dan sebesar 91,27 % penduduk Kabupaten telah memiliki akses Sanitasi yang layak, Keberadaan Fasilitas Sanitasi tersebut juga memberikan manfaat bagi kaum perempuan.

4. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yaitu : 15 tahun ke atas. Pada umumnya angka prosentase TPAK laki - laki lebih besar dari pada perempuan. Hal ini merupakan gejala normal masyarakat di Indonesia. Laki - laki bekerja mencari nafkah keluarga, sedangkan sebagian besar perempuan pada posisi sekedar membantu. TPAK Perempuan Kabupaten Gianyar Tahun 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015 , seperti tercantum dalam Tabel dibawah ini.

Tabel X
TPAK dari Tahun 2012-2014

JENISKELAMIN	2012	2013	2014	2015
LAKI-LAKI	1.602	1.762	3.992	3.992
PEREMPUAN	1.056	1.016	1.891	1.891
LAKI2	2.658	2.778	5.883	5.883
+PEREMPUAN				

5. Politik:

Pada sektor Publik terutama di bidang politik kesenjangan gender masih nampak diberbagai aspek , seperti : di legislatif, eksekutif maupun yudikatif Keterlibatan laki - laki dan perempuan dilembaga legislatif, khususnya pada keanggotaan DPRD Kabupaten Gianyar tampak sangat timpang Gender. Dari hasil Pemilihan Umum terakhir (2014) dominasi laki - laki dalam keanggotaan DPRD sangat menonjol (92.5 %) berbanding (7,5 %).

TABEL XI
DATA ANGGOTA LEGISLATIF KAB GIA NY AR PEMILU 2014

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PDI.P	13	3	
2	GOLKAR	7	-	
3	GERIND RA	5	-	
4	DEMOKRAT	5	-	
5	NASDEM	2	-	
6	PKPI	2	-	
7	HAN URA	3		
JUMLAH		37	3	

6. Pemerintahan :

Jumlah Pegawai di Pemerintah Kabupaten Gianyar

TABEL XII
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan/
kepankkatan di Kab Gianyar Tahun 2014 dan 2015

Gol	2014						2015					
	Jenis Kelarrun						Jenis Kelamin					
	Jumla			Jum!			Jum!			Jum!		
	L	%	p	%	h	%	L	%	p	%	ah	%
I	118	1.48	28	0.35	146	1.83	115	1.43	27	0.34	142	1.76
II	835	10.45	540	5.76	1375	17.22	813	10.09	468	5.81	1281	15.90
III	1593	19.94	1581	19.79	3174	39.74	1685	20.91	1770	21.97	3455	42.88
IV	1886	23.61	1406	17.60	3292	41.22	1809	22.45	1370	17.00	3179	39.46
Jmh	4432	55.49	3555	44.51	7987	100	4422	54.884	3635	45.116	8057	100

Sumber: BKD. Kabupaten Gianyar.

Tabel XIII
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Unit Kerja di
Kab Gianyar Tahun 2015

Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Lk	Pr		
SKPD Pemerintah Kab. Gianyar	2258	1772	4030	
Taman Kanak-Kanak	1	97	98	
Sekolah Dasar	976	1074	2050	
Sekolah Menengah Pertama	598	407	1005	
Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan	589	285	874	
Sekolah Luar Biasa	0	0	0	
Jumlah	4422	3635	8057	

Sumber: BKD Kabupaten Gianyar

Tabel XIV
Jumlah Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di
Kab. Gianyar Tahun 2014 dan 2015

Eselon	2014			2015		
	L	P	JML	L	P	JML
Ia	1	0	1	1	0	1
Iib	29	4	33	30	4	34
IIla	41	13	54	41	13	54
IIlb	78	28	106	78	29	107
IVa	299	174	473	299	173	472
IVb	62	40	102	61	40	101
V	18	10	28	18	10	28
Jumlah	528	269	797	528	269	797

Sumber: BKD. Kabupaten Gianyar

Dari data tabel pegawai tersebut di atas, menunjukkan bahwa tahun 2014 jumlah pegawai laki - laki lebih besar dari pada jumlah pegawai perempuan, yaitu 4.432 pegawai laki - laki dan 3.555 pegawai perempuan, begitu pula pada tahun 2015 jumlah pegawai laki- laki lebih besar dari pada jumlah pegawai perempuan, yaitu : 4.422 orang pegawai laki - laki dan 3.635 orang pegawai perempuan.

Sedangkan kalau dilihat dari segi jumlah pejabat secara keseluruhan baik eselon II, III, IV dan eselon V, di Kabupaten Gianyar tahun 2015 masih didominasi oleh laki laki yaitu sebesar 66 % dan jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon sebesar 34 % dari 797 jumlah jabatan eselon.

B. Kemajuan yang dicapai:

Pembangunan Kabupaten Gianyar menunjukan peningkatan dari tahun 2013 s.d tahun 2014. IPM tahun 2013 sebesar 74,00 meningkat menjadi 74,29 pada tahun 2014. Meningkatnya IPM selama periode 2013 - 2014 tidak terlepas dari makin membaiknya

kinerja pemerintah yang ditunjukkan oleh peningkatan komponen dasar IPM yaitu angka harapan hidup, melek huruf, rata - rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita. Dukungan dan perhatian yang berarti yang ditunjukkan pemerintah dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender antara lain :

- I. Meningkatnya jumlah staf dan pejabat pemerintah yang mengikuti program peningkatan kapasitas dalam rangka Implementasi Strategi PUG;
2. Ketersediaan Data Statistik Gender;
3. Dibangunnya mekanisme kelembagaan PUG di Lembaga Pemerintah Kabupaten Gianyar;
4. Meningkatnya alokasi dana dalam rangka percepatan PUG;
5. Strategi PUG merupakan proses teknis sekaligus politis;
6. Strategi PUG bukan tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan;

Salah satu titik tolak implementasi strategi PUG dalam penyusunan program pembangunan adalah memahami adanya kebutuhan yang berbeda antara laki - laki dan perempuan.

C. Aspek Kelembagaan yang mendukung PUG:

1. Perda Kabupaten Gianyar Nornor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.
2. Terbentuknya POKJA PUG dan Focal Point masing - masing SKPD
Telah terbitnya Keputusan Bupati Gianyar Nomor 634/06 - B/HK/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Gianyar tertanggal 28 Pebruari 2013 dan Perubahan atas Keputusan Bupati Gianyar Nomor 634/06 - B/HK/2013 tentang Pembentukan Kelornpok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Gianyar tertanggal 8 Juli 2013, serta Surat Keputusan masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang Pembentukan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing - masing SKPD (Contoh : Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perernpuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar Nomor 800/805/BPP & KB tentang Penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tertanggal 19 September 2013).

D. Penganggaran :

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah memberikan perhatian yang positif dengan anggaran pemberdayaan perempuan Tahun 2015 sebesar Rp. 7.714.898.520,-

E. Permasalahan yang dihadapi :

1. Persoalan strategi komunikasi yang kurang memadai dalam pemahaman kesadaran tentang kesetaraan gender, sehingga sosialisasi tentang PUG belum dilakukan dengan tepat karena kemampuan penyelenggara program masih relatif rendah.
2. Sistematika konsep akuntabilitas PUG secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik belum ada, sehingga setiap tahunnya sasaran, tujuan, program dan pelaksanaan evaluasi PUG belum dilaksanakan.
3. Strategi Komunikasi Informasi dan Edukatif PUG di Kabupaten Gianyar perlu ditingkatkan melalui penerbitan dokumen, famplet "press release" dan pemanfaatan "event" penting dan strategis.
4. Program pengembangan kapasitas (Capacity Building) belum sepenuhnya diterima oleh para Pejabat Eksekutif dan Legislatif dan Masyarakat.
5. Media di daerah belum memandang PUG sebagai isu menarik untuk diekspose dan disosialisasikan.

F. Hambatan dan Peran SKPD dalam Melaksanakan Strategi SKPD :

1. Kurangnya komitmen focal point yang ada di setiap SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan PUG.
2. Belum dibuatnya Rencana aksi daerah PUG Kabupaten Gianyar yang mewakili isu pokok dan kerangka pembangunan PUG.
3. Adanya beberapa rekomendasi dan tindak lanjut dari rapat koordinasi pemberdayaan yang belum dapat dilaksanakan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan RAD-PUG secara efektif dan efisien maka perlu ditetapkan suatu perencanaan matang yang berjangka menengah dan pendek termasuk komitmen dalam melaksanakan sistem perencanaan yang baik bisa memacu SKPD dalam melaksanakan perencanaan yang ditetapkan.

Karena PUG bukan merancang program khusus perempuan maka yang harus dilakukan adalah merancang program dengan menerima manfaat laki-laki dan perempuan, program dirancang sedemikian rupa sehingga keduanya bisa berpartisipasi, mengakses mendapatkan manfaat dan memiliki kontrol yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Kebijakan khusus untuk kelompok perempuan sebagai upaya percepatan mengurangi kesenjangan gender.

Komponen dari perencanaan yang menjadi visi dan misi, berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2013. adalah :

1. Visi:

***"Terwujudnya Gianyar yang BAGUS (Bersih, Alami, Giat, Berbudaya dan Sejahtera)
menuju Jagadhita "***

2. Misi:

Maka Misi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Gianyar menetapkan lima Misi Pembangunan sebagai Berikut:

- a. Membangun Pemerintah yang bersih, responsive, berintegritas, professional dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan public.
- b. Gianyar yang bersih, hijau, elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Gianyar yang alami dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial.
- c. Menumbuhkan ethos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan berbasis pada produk unggulan daerah (one village, one product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur.

- d. Menumbuhkembangkan Budaya masyarakat berbasis nilai, kearifan lokal yang dapat menumbuhkan religiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi dengan meningkatkan peranan Desa Pekraman, Banjar, Subak, sekeha dalam menjaga adat, budaya dan agama.
- e. Membangun Pemerintahan yang bersih, responsive, berintegritas, professional dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan public.

B. Tujuan :

Dari rumusan Visi dan misi serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013 - 2018, tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan di Bidang Pembangunan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak adalah :

1. Meningkatkan status, fungsi peranan perempuan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
3. Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, beriman dan bertakwa

C. Sasaran:

1. Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender
2. Meningkatkan Akses, Partisipasi dan Kontrol dan manfaat perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan.
3. Menurunkannya tindak kekerasan dalam ranah domestic dan public.
4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
5. Meningkatnya jaringan kelembagaan dan Pengarusutamaan gender dan anak.
6. Meningkatnya taraf hidup dan pendapatan perempuan dalam rangka ikut menunjang ekonomi keluarga.
7. Meningkatnya kualitas hidup perempuan di Pedesaan.

D. Strategi :

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengasuhan Hak Anak (PUHA)

E. Skala Prioritas Strategi PUG dan PUHA

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi tentang Gender dan anak
2. Peningkatan Kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk pengintegrasian perspektif gender kedalam siklus

- perencanaan dan penganggaran diseluruh satuan kerja perangkat Daerah dengan memperhatikan akses, pengalaman, aspirasi control dan manfaat dari pembangunan.
3. Perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan, Kesehatan, Politik dan Perlindungan Perempuan.
 4. Peningkatan Kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, melalui :
 - Penyusunan dan harmonisasi Peraturan Perundang - undangan terkait.
 - Peningkatan kapasitas pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta tumbuh kembang anak.
 - Peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait perempuan dan pemenuhan hak anak serta organisasi terkait.
 5. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di semua bidang Pembangunan
 6. Koordinasi dan Sinkronisasi program dengan Instansi terkait dalam mewujudkan lingkungan layak anak dan Kesenjangan, Keadilan Gender di segala bidang Pembangunan.

F. Kebijakan :

1. Meningkatkan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG dan PUHA pada kegiatan Pembangunan di Kabupaten Gianyar.
2. Meningkatkan pemahaman dan implementasi PUG dan PUHA.
3. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan yang berbasis kemandirian berusaha.
4. Mewujudkan KKG dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.
5. Mewujudkan Pengelolaan Anggaran Daerah yang responsive gender.
6. Penguatan kelembagaan strategis yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan professional.
7. Penerapan akuntabilitas berbasis kinerja terhadap pelaksanaan program pembangunan responsive gender dan kepentingan terbaik anak.

G. Program:

1. Peningkatan KIE
2. Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan
3. Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
4. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,
5. Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
6. Perlindungan Perempuan dan Anak.

H. Indikator Keberhasilan :

1. Adanya data terpilah disetiap SKPD
2. Bertambahnya pelayanan public berspektif gender kepada masyarakat oleh SKPD dan lembaga lainnya.
3. Semakin kecilnya kesenjangan gender
4. Adanya peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia), IPG (Indek Pembangunan Gender), dan GEM (Gender Empowerment Measure).
5. Tersusunnya RKA - SKPD yang responsive Gender.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PUG

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD) Kabupaten Gianyar sebagaimana tertuang dalam matrik sebagai berikut :

Aspek Rencana Aksi Daerah	Kebijakan dan Sasaran	Program	Kegiatan	Tolok Ukur Keberhasilan	Unsur Terkait	Penanggung Jawab	Skala Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Membangun komitmen antar pemangku kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG pada kegiatan pembangunan Kabupaten Gianyar	Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Advokasi dan pendampingan tentang RAD PUG di Kabupaten Gianyar	1. Adanya Komitmen dari setiap pimpinan SKPD, DPRD Kabupaten Gianyar, Masyarakat 2. Adanya peran-dan omongan dari SKPD Kabupaten Gianyar masyarakat	SKPD Kabupaten Gianyar	Tahap Inisiasi BPP&KB, Bappeda Litbang	Tahap Inisiasi legalisasi dan pembelajaran
			Perumusan Kebijakan dan sinkronisasi anggaran Program PP	Adanya Komitmen bersama dan keberpihakan anggaran pada program PP	Tim anggaran Pemerintah Daerah dan Tim anggaran DPRD	Bappeda Litbang, Bagian Keuangan, BPP & KB Gianyar	
			Lokakarya dimensi gender dalam berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah	Terjadinya kesepahaman terhadap pembangunan yang responsif gender	SKPD Kabupaten Gianyar	BPP&KB dan Bappeda Litbang	
			Pelatihan analisis gender di SKPD Kabupaten Gianyar	Meningkatnya ketrampilan analisis gender	SKPD Kabupaten Gianyar	BPP&KB Gianyar	
			Penyusunan pedoman PUG (JobDesc, juknis, Jukiak, Jukang)	Tersedianya buku pedoman	BPP&KB Gianyar, Bappeda, Litbang, Diskes, Disnaker, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi	BPP&KB Gianyar	
				Terjadinya	SKPD Kabupaten Gianyar	BPP&KB	

			konsultasi publik dim pelaksanaan kegiatan PUG	kesepahaman dalam pelaksanaan strategi PUG dan Program PP	Gianyar	Gianyar	
			Memfasilitasi jarmg aspiras, masyarakat untuk susulan anggaran responsif gender	Adanya usulan kegiatan dan masyarakat yang responsif gender	PKK BPMD dan Pemdes Bappeda Litbang dan BPP&KB Gianyar	BPP&KB Granvar	
2 Memperkuat lembaga pp untuk mampu menjalankan fungsi fasilitas: advokasi, dan monev implementasi strategi PUG	Penguatan kelembagaan strategs yang di dukung oleh sumberdaya rnanusa yang profesional dan sumberdaya yang memadai	Penguatan kelembagaan Pug dan Anak	Pembentukan Pocai Point dan Pok1a di SKPD Kab Giarvar	Terbentuknya Focal point dan pokja d1 nap SKPD Kab. Gianyar	Semua SKPD Kabupaten Gianyar	Tahap tnis.asi BPP&KB dan Bappeda Litbang	Tahop 2 pelaksana an dan Pemantap an
			Membentuk jaringan kerja permanen di instansi Vertikal kab. Gianyar	Terbentuknya Pokja Instansi Vertikal	BPP&KB Bappeda Litbang, Diskes, Disdik para dan instansi vertikal	BPP&KB, Bappeda Litbang	
			Memperkuat kelen.bagaan dan tata laksana yang menangarn PP dan PUG	Adan ya STOK setingkat Eselon II	KPP, Bagian Organisasi dan Tata laksana	Bagi an Organisasi dan Tata Laksana	
			Capacity building bagi lembaga yang menangaru gender	Pemahaman KSA gender yang konpherensif di nap lembaga dan Pemermtah	Semua SKPD, BKB dan KS	Bad an Kepegawaian Daerah pendidikan dan Pelatihan	
3. Membangun mekanisme Pelaksanaan strategi PUG	Mewujudkan Strategi PUG melalui perencanaa, Implementasi dan Pengendalian yang terarah	Peningkatan per an serta kesetaraan gender dalam pembanguna n	Membangun sistem informasi gender	Adnya sistem jaringan informasi gender	BPP&KB, Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika	BPP&KB, Dinas Perhubungan komunikasi dan ,nformatika	Tahap pelaksana an dan pemantap an
			Membuat juknls khusus PUG dim perencanaan pembanguna n	Adanya Juknis tentang perencanaan PUG	SKPO Kab. Gianyar	Bappeda Litbang, BPP&KB	
			Menyelengga rakan Rakor PP dan PUG d1 Kab. Gianyar	Terselengga nya Rakor Tahunan	SKPD Kab. Gianyar	BPP&KB	
			Penelitian dspartas gender di Kab Gianyar	Adanya data kuantitatif dan kualitatif sebagai dat Base	SKPD Gianyar	Kab BPP&KB	
			Kaiian	Adanya informasi	Semua SKPD	BPP&KB	

			Pelaksanaan PUG	pelaksanaan PUG	Kab. Gianyar		
4. Membangun kinerja dan akuntabilitas program yang responsif gender	Penerapan Akuntabilitas dan kinerja terhadap pelaksanaan program yang berbasis strategi, PUG	Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG	1. Tersusunnya laporan kinerja strategi PUG masuk dalam la. kip, KLPJ Bupati Gianyar	BPP&KB, Bappeda Li. bang	BPP&KB, Bappeda Libang	Tahap 2 pelaksanaan dan pemantauan
				2. Adanya umpan balik hasu monev pelaksanaan PUG			Tahap pengembaran
			Menyusun laporan IPM	Adanya data terpilah dan statistik terpadu	BPP&KB, Bappeda uang	BPP&KB, Bappeda ubang	
			Menyusun laporan Tahunan hasil pelaksanaan PUG kepada IMeneg PP&PA RI melalui BP3A Prov. Bali dan Bupati Gianyar	Adanya laporan khusus pelaksanaan PUG di Kab. Gianyar	BPP&KB, Bappeda Li. bang	BPP&KB, Bappeda Li. bang	

BUPATI GIANYAR,

Ttd.

A.A. GDE AGUNG BHARATA